



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : PLN KANTOR PUSAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SALEH SISWANTO**
2. Jabatan : **EXECUTIVE VICE PRESIDENT PENJUALAN DAN PELAYANAN PELANGGAN RETAIL**
3. NHK : **197948**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.165.000.000**

1. Tanah Seluas 880 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 272 m2/440 m2 di KAB / KOTA BANGKALAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.105.000.000
3. Tanah Seluas 449 m2 di KAB / KOTA BANGKALAN, HASIL SENDIRI Rp. 625.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.855.000.000
5. Tanah Seluas 2298 m2 di KAB / KOTA BANGKALAN, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
6. Tanah Seluas 430 m2 di KAB / KOTA KOTA PANGKALPINANG, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
7. Tanah Seluas 8450 m2 di KAB / KOTA BANGKA, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 679.250.000**

1. MOTOR, HONDA BLADE Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 750.000
2. MOTOR, YAMAHA N-MAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOBIL, TOYOTA INOVA (PROGRAM COP 50% PLN) INOVA V Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000



4. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
5. MOBIL, HYUNDAI (PROGRAM COP PLN, 50% DITANGGUNG KANTOR) SANTA FE (PROGRAM COP PLN, 50% DITANGGUNG KANTOR) Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

| | | |
|--|-----|---------------|
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 120.000.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | 307.000.000 |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 3.217.931.890 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 8.489.181.890 |
| III. HUTANG | Rp. | 230.719.800 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 8.258.462.090 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.